

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Pendahuluan Tugas Akhir, yang terdiri dari Latar Belakang Penulisan Tugas Akhir, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan, Manfaat Penulisan Tugas Akhir, serta Sistematika Penulisan. Adapun Bab ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai pokok bahasan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi Wajib Pajak (Studi Kasus di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas).”

1.1 Latar Belakang

Pada Tahun 2020, negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia menghadapi permasalahan kesehatan nasional akibat pandemi *Covid-19* yang menyebar secara global. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional, termasuk penerimaan negara dari sektor perpajakan. Banyak kegiatan usaha yang terpaksa harus berhenti beroperasi dan berakhir tutup, serta pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Pada masa pandemi ini, pemerintah juga menerapkan kebijakan *social distancing* sebagai upaya dalam mengurangi penyebaran virus *Covid-19* dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Namun, kebijakan dari situasi tersebut juga memberikan dampak pada aktivitas perpajakan, seperti menimbulkan tunggakan pajak, sanksi, dan denda pajak.

Hal ini tentu sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian sekaligus ibu kota Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dari sektor perpajakan daerah yang cenderung menurun pada Tahun 2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Efektivitas
2018	Rp 38.125.000.000.000	Rp 37.538.910.415.520	98,46%
2019	Rp 44.540.000.000.000	Rp 40.300.337.741.155	90,48%
2020	Rp 32.480.000.000.000	Rp 31.924.784.307.119	98,29%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI
Jakarta

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019, realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar Rp 2.761.427.325.635 dari Tahun 2018. Namun, karena adanya pandemi *Covid-19* mengakibatkan kebijakan pandemi yang berhubungan dengan kegiatan dalam program Aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti razia gabungan dan *door to door* bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja terkait KBm-BDU tidak diberlakukan, SAMOLNAS ditutup oleh Polda Metro Jaya, dan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau dikenal dengan *social distancing* yang membatasi kegiatan. Sehingga Pada Tahun 2020, realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta cenderung sangat rendah karena mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp 8.375.553.434.036 dari Tahun 2019.

Dalam hal ini, nilai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki nilai yang tertinggi dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah data mengenai penerimaan pajak daerah Tahun 2019 dan 2020 pada wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2019 dan 2020

Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan 2019 (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan 2020 (dalam rupiah)
PKB	8.844.020.904.421	7.879.325.541.468
BBN-KB	5.403.535.434.750	3.669.362.320.550
PBB-KB	1.262.748.852.467	995.258.633.326
Pajak Air Tanah	125.352.113.150	78.387.858.465
Pajak Hotel	1.768.198.141.531	749.488.285.186
Pajak Restoran	3.615.263.427.925	1.940.390.778.104
Pajak Hiburan	860.666.265.952	220.354.600.880
Pajak Reklame	1.081.128.617.233	828.045.160.936
Pajak Penerang Jalan	814.112.934.989	778.749.530.103
Pajak Parkir	537.128.072.254	337.745.382.843
BPHTB	5.735.504.432.533	4.681.442.315.680
Pajak Rokok	610.105.644.656	793.754.922.458
PBB-P2	9.642.572.899.294	8.972.478.977.120

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI
Jakarta

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jumlah realisasi pajak daerah yang tertinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah Rp 9.642.572.899.294 pada Tahun 2019 dan Rp 8.972.478.977.120 pada Tahun 2020.

Maka dari itu, untuk tetap menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah, terutama PBB-P2 dan sebagai bentuk upaya dalam menjaga pelayanan pajak kepada masyarakat di tengah keterbatasan mobilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberikan pelayanan pajak yang

dilakukan secara *online* (daring) untuk menjaga kelancaran penerimaan pajak dan pembayaran pajak terutang. Salah satu langkah penting yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seiring berkembangnya teknologi informasi dan kebutuhan akan sistem administrasi yang efisien, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Regulasi ini menetapkan perubahan mekanisme penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2), dari yang sebelumnya dilakukan secara manual dalam bentuk kertas, secara bertahap dialihkan dengan sistem elektronik atau dikenal dengan e-SPPT PBB-P2.

Penerapan kebijakan sistem e-SPPT ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses dan membayar kewajiban perpajakannya secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang perpajakan daerah, yaitu administrasi perpajakan.

Namun pada praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam melakukan pendaftaran e-SPPT PBB-P2 pada lingkup wilayah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas hanya menyentuh persentase tertinggi sebesar 53,01% pada Tahun 2023, meskipun grafiknya cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini dapat membuktikan bahwa masyarakat yang memiliki objek PBB-P2 di Kecamatan Ciracas yang terlibat dalam sistem perpajakan dan menunjukan kesadaran wajib pajaknya terhadap PBB-P2 selama 5 Tahun berturut-turut hanya mencapai 40,02%. Berikut adalah data kepatuhan wajib pajak dalam pendaftaran e-SPPT PBB-P2 di wilayah UPPPD Kecamatan Ciracas.

Tabel 1. 3 Data Kepatuhan Pendaftaran e-SPPT PBB-P2 Wajib Pajak di Wilayah UPPPD Kecamatan Ciracas Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Data SPPT Terbit		Data SPPT yang dibayarkan	Persentase Kepatuhan
	Jumlah SPPT	SPPT PBB-P2 Dengan Nominal	Jumlah SPPT dibayar	
2019	52.381	16.880	5.139	30,44%
2020	52.760	16.790	5.178	30,84%
2021	53.025	16.715	6.498	38,88%
2022	53.509	14.449	7.232	50,05%
2023	53.390	14.634	7.757	53,01%
Jumlah	265.065 lembar	79.468 lembar	31.804 lembar	40,02%

Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa selain tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat dari tahun ke tahun, masih terdapat sekitar 47% wajib pajak atau sekitar 6.877 SPPT PBB-P2 yang belum dilunasi oleh wajib pajak hingga waktu jatuh temponya pada Tahun 2023. Di mana hal ini terbilang cukup banyak karena hampir dari setengah SPPT dengan nominal yang diterbitkan tidak dilunasi oleh wajib pajak yang terkait. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak dalam pendaftaran e-SPPT PBB-P2 di wilayah Kecamatan Ciracas selama dan pasca pandemi *Covid-19* terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dikatakan masih dalam persentase dibawah 50%.

Selain itu, pada praktiknya masih banyak terdapat wajib pajak yang datang pada kantor UPPPD Kecamatan Ciracas untuk menanyakan terkait SPPT PBB-P2 miliknya. Hal ini dibuktikan dengan rekap data pelayanan

yang masuk pada pelayanan PBB-P2 di UPPPD Kecamatan Ciracas pada 5 tahun terakhir sejak 2019, yaitu sebelum sampai dengan pasca pandemi *Covid-19*.

Tabel 1. 4 Pelayanan PBB-P2 Kecamatan Ciracas Periode Tahun 2019-2023

Jenis Pelayanan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pemberian Informasi e-SPPT PBB-P2	8	213	211	768	394
Salinan SPPT PBB-P2	67	31	-	-	11
Pengurangan atas SPPT PBB-P2	141	142	48	25	9
Pembebasan PBB-P2	426	390	334	3	219
Pembetulan PBB-P2	664	439	450	473	254
Mutasi/Perubahan Subjek dan Objek Pajak OBB-P2	268	311	244	250	663
Permohonan Objek Baru PBB-P2	150	164	900	645	631
Pengurangan Sanksi Administrasi	192	164	159	40	34
Total	1.916	1.854	2.346	2.204	2.215

Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan PBB-P2 pada UPPPD Ciracas cenderung meningkat saat dan pasca pandemi *Covid-19*, yaitu Tahun 2021 sejumlah 2.346 data yang masuk, Tahun 2022 sejumlah 2.204 data yang masuk, dan Tahun 2023 sejumlah 2.215 data yang masuk. Berbeda pada Tahun 2020 yang sempat menurun karena maraknya

penyebaran *Covid-19* yang menimbulkan kebijakan PSBB atau dikenal *social distancing*.

Pada data di atas juga membuktikan pelayanan PBB-P2 terkait pemberian informasi atas e-SPPT PBB-P2 terus meningkat selama dan pasca pandemi *Covid-19*. Banyak wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Kecamatan Ciracas datang pada UPPPD Ciracas untuk meminta atau menanyakan informasi terkait e-SPPT PBB-P2. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur pendaftaran e-SPPT PBB-P2 karena beberapa faktor, diantaranya keterbatasan literasi, kurangnya sosialisasi, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya di lapangan.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan penerapan e-SPPT PBB-P2 secara daring yang diharapkan dapat diakses secara mandiri oleh wajib pajak, dengan kenyataan di lapangan di mana masih banyak wajib pajak di wilayah Kecamatan Ciracas yang belum memahami prosedur pendaftarannya. Kondisi ini ditandai dengan masih tingginya jumlah wajib pajak yang datang langsung ke kantor UPPPD Kecamatan Ciracas untuk mendapatkan informasi layanan e-SPPT PBB-P2.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan yang disusun dalam Tugas Akhir dengan judul "Prosedur Pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi Wajib Pajak (Studi Kasus di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas)".

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan judul tersebut, maka ruang lingkup pembahasan masalah dapat dirumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian yang meliputi:

1. Definisi Pajak
2. Definisi Pajak Daerah
3. Jenis-Jenis Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta
4. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
5. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
6. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
7. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
8. Tarif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
9. Masa Pajak dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
10. Jenis-Jenis Program Insentif PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2
12. Prosedur Pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi Wajib Pajak (Studi Kasus di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas)
13. Perbedaan Teori dan Praktik di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas
14. Kendala di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas
15. Upaya di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi tujuan dan manfaat tertentu sebagaimana berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan. Sedangkan tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Pajak
2. Untuk menjelaskan Pajak Daerah
3. Untuk menjelaskan Jenis-Jenis Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta
4. Untuk menjelaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
5. Untuk memaparkan dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
6. Untuk menjabarkan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
7. Untuk menjabarkan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
8. Untuk menjabarkan tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
9. Untuk menjabarkan masa pajak perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
10. Untuk memaparkan Jenis-Jenis Program Insentif PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta
11. Untuk menjelaskan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2
12. Untuk menjabarkan prosedur pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi wajib pajak (studi kasus di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas)
13. Untuk menjelaskan perbedaan teori dan praktik di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

14. Untuk menjelaskan kendala di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas
15. Untuk menjelaskan upaya di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Penulisan ini bertujuan untuk menjadi sarana perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik langsung di lapangan, khususnya pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep-konsep teoritis yang dipelajari di bangku kuliah diimplementasikan dalam situasi nyata di lingkungan kerja.
 - b. Dengan melakukan Kuliah Kerja Praktik pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas dan keterlibatan langsung dalam proses pelayanan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mahasiswa memperoleh pengalaman berharga yang dapat mengasah keterampilan serta memperkuat persiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja profesional, terutama dalam bidang administrasi perpajakan, baik daerah maupun pusat.

2. Bagi Akademisi Universitas Diponegoro

- a. Sebagai sumber tambahan referensi bagi dosen, peneliti, maupun mahasiswa yang akan mengkaji topik seputar pajak daerah, khususnya yang terdapat kaitannya dengan penulisan ini, yaitu prosedur pendaftaran E-SPPPT PBB-P2 bagi wajib pajak di wilayah DKI Jakarta. Informasi dan data yang disajikan diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang perpajakan daerah.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam meningkatkan ilmu praktik pada mahasiswa Program Diploma III Administrasi Pajak K.Batang.
- c. Sebagai pengetahuan secara umum bagi mahasiswa Program Diploma III Administrasi Pajak K.Batang.

3. Bagi Instansi Unit Pelayanan Pemugutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi UPPPD Kecamatan Ciracas dalam upaya optimalisasi pelaksanaan prosedur pendaftaran e-SPPT PBB-P2.
- b. Hasil dari analisis penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran penting Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, diperlukan metode pengumpulan data yang tepat agar hasil dari penulisan dapat diperoleh secara akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan memilih jenis data

yang sesuai serta menggunakan cara yang tepat dalam memperoleh data tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jenis data yang dibutuhkan serta metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini. Adapun proses pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019:194) Wawancara dan survei memberikan data primer kepada peneliti. Wawancara dan observasi dapat memberikan data ini. Dalam hal ini data primer yang akan diperoleh antara lain adalah wawancara dan pengamatan dengan pembimbing lapangan terkait keterangan-keterangan mengenai Pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi wajib pajak, dengan studi kasus di UPPPD Ciracas dan data berupa peraturan, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019:194) Peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder melengkapi data utama yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder yang akan diperoleh adalah mengenai gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, seperti sejarah singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi, kedudukan dan wilayah kerja, tugas pokok dan fungsi Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda), serta catatan atau referensi lain yang penulisan butuhkan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan, sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2019:226) observasi merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan dengan mengamati secara langsung suatu objek penelitian atau penulisan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan berbagai alat bantu guna mengumpulkan data yang akurat sesuai dengan fokus penulisan. Observasi tidak hanya dilakukan terhadap manusia, tetapi juga terhadap berbagai objek lainnya, termasuk lingkungan atau kondisi tertentu. Dalam penulisan ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi wajib pajak, dengan studi kasus di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas.

2. Metode Wawancara

Seperti yang dijelaskan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2019:418), wawancara adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang dilakukan melalui tanya jawab untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau pendapat mengenai suatu topik. Hasil dari wawancara ini kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan penulisan. Dalam penulisan ini, data diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak Sub Bagian Satuan Pelaksana Pelayanan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas

guna memperoleh informasi terkait proses pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi wajib pajak.

3. Metode Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2017), studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur, baik berupa buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan teori, nilai, dan norma yang berkembang sesuai dengan topik penulisan. Pada penulisan ini, penulis menggunakan studi pustaka dengan membaca referensi dari internet dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi wajib pajak yang menjadi fokus penulisan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyusun Sistematika Penulisan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi serta pembahasan permasalahan yang diangkat. Adapun susunan Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan bagi mahasiswa, bagi akademisi, dan bagi instansi, cara pengumpulan data, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan dalam penulisan penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi misi, uraian logo

atau lambang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas selaku tempat penelitian untuk penulisan Tugas Akhir dan Kuliah Kerja Praktik penulis, serta uraian susunan kepegawaian beserta tugasnya masing-masingnya.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Pada bab ini membahas mengenai definisi pajak, definisi pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta, gambaran umum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dasar hukum PBB-P2, subjek dan objek PBB-P2, dasar pengenaan PBB-P2, tarif pengenaan PBB-P2, masa pajak dan perhitungan PBB-P2, jenis-jenis program insentif PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, prosedur pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi wajib pajak (studi kasus di UPPPD Kecamatan Ciracas), perbedaan teori dan praktik, kendala, serta upaya di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai bagian akhir dari penulisan laporan Tugas Akhir yang berisi rangkuman atau kesimpulan dari hasil penulisan yang dilakukan serta saran-saran atas tinjauan teori dan praktik tinjauan praktik terkait Prosedur Pendaftaran e-SPPT PBB-P2 bagi Wajib Pajak (Studi Kasus di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas).